

Analisis Bonus Demografi Ditengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia

Citra Wulandari Manik^{1*}, Hilikia Natasya Boru Giting¹, Lathifah Aini¹, Salsabila¹ Nasrullah Hidayat¹

¹ Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

*Email Koresponden: ainilathifah854@gmail.com

Diterima: 16-04-2025

Disetujui: 01-05-2025

Publish: 04-06-2025

Abstrak Bonus demografi memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui populasi usia produktif yang dominan. Namun, tingginya angka pengangguran terdidik menciptakan paradoks yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika bonus demografi di tengah meningkatnya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji kajian teoritis dan empiris terkait ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian keterampilan, fluktuasi ekonomi, dan kelemahan dalam kebijakan ketenagakerjaan merupakan kontributor utama terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah dan universitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk reformasi pendidikan, peningkatan pelatihan kejuruan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan integrasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Dengan upaya-upaya tersebut, bonus demografi dapat ditransformasikan menjadi momentum produktif yang berkelanjutan dan bukan menjadi beban demografi di masa depan.

Kata kunci: Bonus Demografi, Pengangguran Terdidik, Tenaga Kerja

***Abstract** The demographic bonus presents a strategic opportunity for Indonesia to accelerate economic growth through a dominant productive-age population. However, the high rate of educated unemployment creates a paradox that hinders the optimization of this potential. This study aims to analyze the dynamics of the demographic bonus amid the increasing number of educated unemployed in Indonesia. Using a qualitative approach through literature review, this research examines theoretical and empirical studies related to the mismatch between the education system and labor market demands. The findings indicate that skill mismatches, economic fluctuations, and weaknesses in employment policies are the main contributors to the high unemployment rate among high school and university graduates. Therefore, a comprehensive strategy is required, including education reform, vocational training enhancement, creation of quality jobs, and integration between the government, industries, and educational institutions. With these efforts, the demographic bonus can be transformed into a sustainable productive momentum rather than becoming a demographic burden in the future.*

Keywords: Demographic Bonus, Educated Unemployment, Labor Force

1. PENDAHULUAN

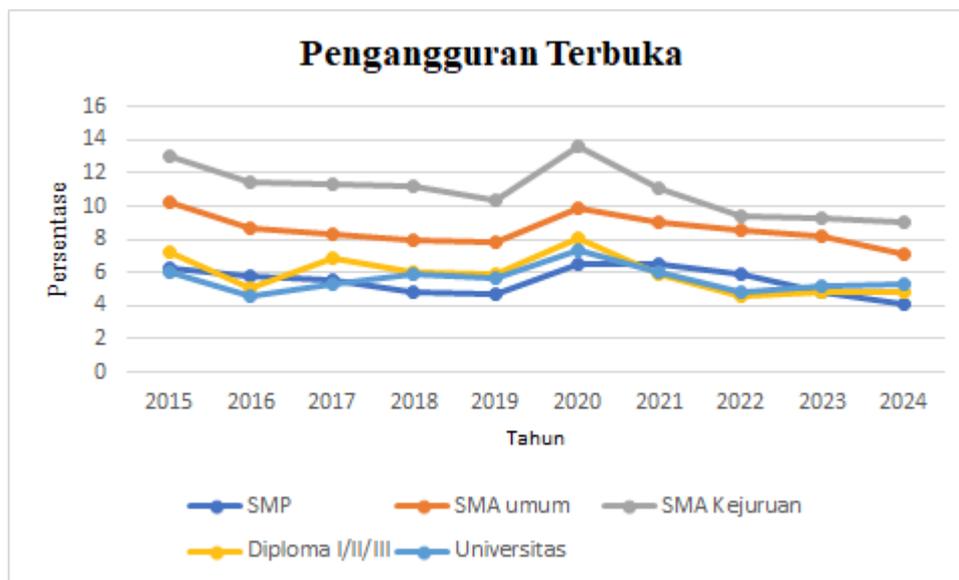
Bonus demografi telah menjadi bagian penting dari perencanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun terakhir. Bonus demografi adalah ketika jumlah orang usia produktif (15–64 tahun) lebih banyak daripada orang yang belum atau tidak lagi produktif, yaitu mereka yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Bappenas memperkirakan bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya dari tahun 2020 hingga 2035. Karena ketersediaan tenaga kerja yang besar, situasi ini memberikan peluang besar bagi negara untuk mempercepat pertumbuhannya (Melo et al., 2024). Dengan kebijakan yang tepat, produktivitas nasional dapat meningkat ketika mayoritas penduduk usia kerja. Bonus demografi dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, tabungan, dan investasi serta peningkatan penyerapan tenaga kerja (Jati, 2015).

Tetapi potensi besar ini tidak serta-merta menghasilkan keuntungan. Kualitas pendidikan yang buruk, akses yang buruk terhadap layanan kesehatan, dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja adalah beberapa dari banyak masalah yang masih harus diatasi. Kelebihan penduduk usia produktif dapat berubah menjadi masalah sosial dan ekonomi jika masalah ini tidak segera diatasi (Afryapollo, 2024). Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan usia muda menunjukkan bahwa bonus demografi mungkin tidak berguna tanpa lapangan kerja yang cukup

(Setiawan, 2018). Kesehatan juga penting; masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan berdaya saing (Purba et al., 2024).

Saat ini, potensi demografis Indonesia menghadapi banyak masalah struktural, terutama tingkat pengangguran terdidik yang tinggi. Malthus berpendapat bahwa jumlah penduduk sering kali lebih besar daripada kebutuhan tenaga kerja, yang mengakibatkan kelebihan penduduk dan penurunan upah (Junaidi & Hardiani, 2009). Menurut laporan IMF tahun 2024, tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai sekitar 5%, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi di wilayah ASEAN. Ironisnya, sebagian besar pengangguran berasal dari orang-orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, terutama mereka yang lulus sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Ketidaksiesuaian antara kebutuhan pasar dan kompetensi tenaga kerja merupakan faktor utama yang menghambat penyerapan tenaga kerja terdidik. Kondisi pengangguran terdidik dapat dilihat dari gambar grafik berikut:

Gambar 1. Grafik Pengangguran Terbuka 2015-2024



Sumber: Data BPS

Menurut data di atas, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatat tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran SMK mencapai puncaknya di 13,55%, tetapi turun menjadi 9,01% pada tahun 2024. Tingkat pengangguran lulusan SMA umum dan perguruan tinggi juga menunjukkan tren yang sama.

Ini menunjukkan bahwa kemudahan mendapatkan pekerjaan tidak selalu berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Adanya ketidaksiesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja ditunjukkan oleh tingginya tingkat pengangguran di kalangan terdidik. Dalam konteks bonus demografi, situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi usia produktifnya. Ini berisiko mengubah bonus demografi menjadi beban demografi jika tidak ditangani dengan serius.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bonus demografi yang mungkin berubah menjadi liabilitas demografis jika angkatan kerja yang besar tidak dikombinasikan dengan distribusi ekonomi yang adil, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Kegagalan untuk mengontrol momentum ini dalam ekonomi makro dapat mengakibatkan inefisiensi pasar tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada stabilitas fiskal dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika bonus demografi di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat pengangguran terdidik yang tinggi. Penelitian ini mencapai tujuan ini melalui peninjauan literatur terhadap studi teoritis dan empiris yang relevan. Diharapkan bahwa kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara-cara kebijakan strategis yang dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dan tantangan struktural dari bonus demografi di Indonesia.

Pengangguran terdidik, juga disebut sebagai pengangguran terdidik, merujuk pada orang yang telah

menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka memiliki keinginan untuk melakukannya. Menurut Mankiw (2000), kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dan memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kelompok orang ini sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas, yang berarti keluarga mereka memberi mereka dukungan finansial meskipun mereka menganggur (Karmeli et al., 2019). Sejalan dengan definisi tersebut, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa pengangguran terdidik adalah proporsi pencari kerja lulusan SLTA ke atas terhadap total angkatan kerja dalam kelompok pendidikan tersebut. Dengan kata lain, mereka adalah lulusan SMA/SMK, diploma, atau sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan (Anjarwati & Juliprijanto, 2021).

Mayoritas pengangguran terdidik, menurut Mulyono (1997), adalah lulusan baru yang masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Keluarga, yang biasanya memiliki kondisi ekonomi yang baik, biasanya menanggung kebutuhan hidup mereka selama masa pencarian (Tukiran et al., 2007) Jumlah pengangguran terdidik terus meningkat karena sejumlah alasan. Faktor pertama adalah struktural, yaitu kurangnya keterampilan praktis yang dimiliki lulusan muda dibandingkan dengan tenaga kerja berpengalaman dan usia mereka saat memasuki pasar kerja. Faktor kedua adalah non-struktural, yaitu kebijakan kenaikan upah minimum yang membuat perusahaan menunda perekrutan atau bahkan memecahkan karyawannya. Secara umum, menurut Mulyono (1997) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula harapan mereka terhadap pekerjaan yang mereka inginkan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pengangguran lebih lama (Islamia, 2017).

Menurut (Suhandi et al., 2020), tenaga kerja sendiri adalah individu yang siap bekerja yang berusia antara 15 dan 65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau masyarakat. Tenaga kerja adalah komponen masyarakat yang berfungsi sebagai input produksi dalam proses pembangunan ekonomi. Dinamika demografi, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, menentukan ketersediaannya. Ini mencakup elemen sebaran, kualitas, dan kuantitas, yang secara langsung memengaruhi arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi (Junaidi & Hardiani, 2009). Malthus berpendapat bahwa dua hal mempengaruhi jumlah penduduk dan oleh karena itu ketersediaan tenaga kerja. Yang pertama adalah permintaan untuk tenaga kerja, yang bergantung pada produktivitas lahan. Yang kedua adalah dorongan untuk bereproduksi alami, yang lebih penting daripada kebutuhan ekonomi.

Malthus juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk sering kali lebih besar daripada kebutuhan tenaga kerja, yang menyebabkan kelebihan penduduk dan penurunan upah, sehingga banyak orang tidak mampu membentuk keluarga. Meskipun upah rendah dapat mendorong perluasan lahan pertanian dan peningkatan produksi pangan, hal ini justru memicu siklus baru pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada kenaikan produksi, sehingga kemiskinan tetap berlanjut.

Dengan demikian, pengangguran terdidik di Indonesia menjadi semakin nyata dan mendesak. Bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah Indonesia akan terbuang sia-sia jika negara tidak segera mengatasi masalah keterampilan yang tidak seimbang, ketidaksesuaian antara pendidikan dan industri, dan kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa ledakan usia produktif tidak menjadi sumber tekanan sosial dan ekonomi di masa mendatang, sangat penting untuk menerapkan strategi kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi (Afryapollo, 2024; Melo et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research). Pendekatan tersebut dipilih guna menelaah fenomena pengangguran terdidik dalam kerangka bonus demografi, dengan mengkaji beragam literatur yang relevan. Adapun sumber data yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga resmi, serta artikel penelitian yang berkaitan secara langsung dengan tema pembahasan.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses interpretasi data sekunder. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menelaah dan menyintesis argumen ilmiah dari berbagai temuan sebelumnya guna membangun kerangka analisis yang komprehensif. Studi kepustakaan memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami dinamika pengangguran terdidik dan bagaimana fenomena tersebut memengaruhi serta dipengaruhi

oleh kondisi bonus demografi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yang berarti data yang dikumpulkan dari berbagai referensi diolah dengan cara mengaitkan isu-isu yang ada ke dalam variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi keterkaitan dan korelasi antar variabel tersebut. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara mendalam serta menyoroti aspek-aspek yang menjadi penyebab utama pengangguran terdidik di tengah bonus demografi. Menurut (Sugiyono, 2019), pendekatan ini melibatkan peneliti sebagai alat utama dalam proses interpretasi data sekunder. Studi kepustakaan memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis tentang masalah yang dibahas melalui sintesis dan argumen ilmiah yang didasarkan pada temuan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Bonus Demografi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Bonus demografi di Indonesia adalah periode saat proporsi penduduk dalam usia produktif (15 hingga 64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Fenomena ini memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyimpan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Penelitian oleh (Nainggolan & Budiman, 2024), memperkirakan bahwa Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi antara tahun 2028 dan 2031, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta orang.

Untuk memanfaatkan kesempatan ini, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap teknologi. (Melo et al., 2024) menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan kesempatan kerja, sangat penting untuk memanfaatkan bonus demografi. (Setiawan, 2018) juga menekankan bahwa jika dikelola dengan baik, bonus demografi bisa mengurangi angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, jika tidak ditangani, fenomena ini dapat berisiko meningkatkan pengangguran dan memperburuk ketimpangan sosial. (Jati, 2015) mengingatkan bahwa tanpa adanya kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi terjatuh dalam trap negara berpenghasilan menengah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang holistik dan sinergis antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan industri. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengambil peluang dari bonus demografi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa karakteristik utama dari bonus demografi di Indonesia adalah:

1. **Dominasi Penduduk Usia Produktif:**
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi Indonesia sekarang berada dalam kelompok usia produktif. Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang sangat besar jika dikelola secara efektif.
2. **Penurunan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio):**
Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan antara penduduk yang tidak produktif dan yang produktif. Ketika rasio ini menurun, hal tersebut menandakan bahwa beban ekonomi pada kelompok usia produktif menjadi lebih ringan.
3. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Merata:**
Walaupun ada banyak tenaga kerja yang produktif, pendidikan dan keterampilan mereka masih belum sama, terutama di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
4. **Urbanisasi dan Perpindahan Tenaga Kerja:**
Bonus demografi juga mendorong urbanisasi karena banyak orang yang berusia produktif pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ini memberi tekanan lebih pada infrastruktur dan layanan di kota.
5. **Tantangan Pengangguran Kaum Muda:**
Pertumbuhan lapangan kerja tidak cukup untuk mengimbangi jumlah angkatan kerja baru, sehingga pengangguran di kalangan pemuda tetap menjadi masalah.
6. **Kesempatan Emas untuk Pembangunan Ekonomi:**
Dengan banyaknya tenaga kerja, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Tingkat Pengangguran Terdidik Di Indonesia Meskipun Berada Dalam Periode Bonus Demografi.

Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia pada masa bonus demografi merupakan sebuah kondisi yang bersifat paradoksal. Dalam periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) melebihi jumlah penduduk non-produktif, seharusnya terdapat peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (7,11%) dan pendidikan tinggi (6,95%). Adapun sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Makro

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks, terlebih ketika pandemi COVID-19 melanda dan menyebabkan perlambatan ekonomi secara signifikan. Pandemi tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan gejolak pada sektor ketenagakerjaan nasional. Tenaga kerja terdidik, khususnya lulusan perguruan tinggi, menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Dalam studi (Yulianti & Handayani, 2021), disebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan upah minimum menciptakan tekanan tambahan bagi dunia usaha. Banyak perusahaan menjadi enggan melakukan ekspansi tenaga kerja, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Akibatnya, peluang kerja bagi tenaga kerja baru, termasuk mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi, menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, harapan terhadap peningkatan investasi asing sebagai salah satu solusi penyediaan lapangan kerja berkualitas belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun secara nominal investasi asing terus masuk, sektor-sektor yang mendapat suntikan dana belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh investor dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi, menciptakan tantangan tersendiri dalam proses penyerapan tenaga kerja. Studi (Fitri & Astuti, 2021) menggarisbawahi adanya ketimpangan struktural antara peningkatan jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi dan ketersediaan pekerjaan formal yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Lulusan perguruan tinggi kerap kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menerima pekerjaan di luar bidang studi mereka, atau bahkan terpaksa menganggur karena kurangnya pilihan yang relevan. Fenomena ini menggambarkan adanya kelebihan pasokan tenaga kerja terdidik, yang tidak diimbangi dengan permintaan yang memadai dari dunia industri.

Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia di mana proporsi penduduk usia produktif berada pada puncaknya yang seharusnya menjadi momentum emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja produktif justru berpotensi menjadikan bonus demografi sebagai beban sosial, bukan keuntungan ekonomi. Jika situasi ini tidak ditangani dengan strategi yang tepat, seperti reformasi kebijakan ketenagakerjaan, perbaikan sistem pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas pelatihan vokasional, maka Indonesia bisa kehilangan peluang besar untuk meningkatkan daya saing nasional dan memperkecil kesenjangan sosial.

Dengan demikian, penyelesaian masalah pengangguran tenaga kerja terdidik memerlukan pendekatan multidimensi, mencakup sinergi antara kebijakan ekonomi makro, perencanaan pendidikan, serta reformasi pasar tenaga kerja. Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dan keterampilan yang dibutuhkan. Tanpa adanya langkah konkret dan kolaboratif, ketimpangan ini berisiko semakin melebar dan menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia

2. Ketidaksesuaian Keterampilan (Skills Mismatch)

Salah satu akar masalah dari tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan riil dunia kerja, atau yang dikenal sebagai skills mismatch. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara apa yang diajarkan di institusi pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. (Rofiq et al., 2020) dalam penelitiannya terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengungkapkan bahwa meskipun kurikulum pendidikan kejuruan telah disertai dengan program Praktik Kerja Industri

(Prakerin), namun hal tersebut belum mampu menjembatani kebutuhan industri secara efektif. Banyak siswa yang menjalani Prakerin hanya sebagai formalitas, tanpa keterlibatan mendalam dalam proses produksi atau penguasaan teknologi yang digunakan di tempat kerja. Akibatnya, lulusan SMK tetap kesulitan untuk langsung terserap ke pasar kerja, bahkan untuk posisi yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Lebih lanjut, fenomena overeducation seperti yang dicatat oleh (Roespita & Ismiyati, 2023) menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang terpaksa bekerja di bidang yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan mereka, atau bahkan di posisi yang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Hal ini tidak hanya mengindikasikan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya manusia, tetapi juga dapat menimbulkan frustrasi dan penurunan motivasi kerja di kalangan lulusan terdidik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurikulum pendidikan tinggi yang cenderung bersifat teoritis dan kurang membekali mahasiswa dengan keterampilan aplikatif yang dibutuhkan di dunia kerja. Minimnya akses terhadap pelatihan tambahan, magang yang berkualitas, serta koneksi dengan dunia industri semakin memperparah situasi ini.

Studi oleh (Utami et al., 2021) yang menganalisis data Sakernas juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pekerjaan dan latar belakang pendidikan lebih banyak terjadi pada lulusan jalur akademik dibandingkan dengan jalur vokasional. Lulusan pendidikan vokasional umumnya dibekali dengan keterampilan yang lebih spesifik dan siap pakai, sehingga memiliki peluang yang sedikit lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan serta penyesuaian antara institusi pendidikan vokasi dan dunia usaha.

Kondisi skills mismatch ini menciptakan efek domino dalam perekonomian dan sosial masyarakat. Ketidakesuaian keterampilan memperlemah produktivitas tenaga kerja, menghambat mobilitas sosial, dan dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti reformasi kurikulum pendidikan berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas program magang dan kerja praktik, serta penguatan kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sistem pendidikan berkelanjutan (lifelong learning), termasuk pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan pengangguran terdidik melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan pendidikan vokasional dan penyelenggaraan program pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu inisiatif yang patut mendapat perhatian adalah pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang bertujuan menyediakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal dan potensi daerah. Program ini menyoar masyarakat di tingkat akar rumput, terutama pemuda yang tidak memiliki akses pendidikan tinggi maupun pelatihan formal. (Wardhani & Nugroho, 2020) mencatat bahwa keberadaan BLK Komunitas telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja muda, terutama dalam sektor informal dan ekonomi kreatif. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh keterbatasan pendanaan, infrastruktur, kualitas instruktur, serta keberlanjutan program jangka panjang. Banyak BLK Komunitas belum mampu menyediakan pelatihan secara konsisten karena bergantung pada hibah dan bantuan pemerintah pusat yang belum merata.

Selain pelatihan, pemerintah juga telah mengimplementasikan reformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk merespons tantangan baru dalam dunia kerja, termasuk melalui penguatan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perluasan perlindungan sosial. (Putri & Siregar, 2022) menyoroti adanya upaya untuk membuat regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel, seperti memperbolehkan sistem kontrak kerja jangka pendek atau outsourcing dengan pengawasan yang lebih ketat. Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja muda tanpa beban administratif yang berlebihan, sekaligus melindungi hak-hak dasar pekerja. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih jauh dari optimal karena lemahnya integrasi antara sektor pendidikan, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja. Ketidaksinambungan ini menyebabkan banyak lulusan pendidikan, termasuk vokasional, tidak memperoleh akses langsung terhadap dunia kerja karena tidak adanya sistem penyaluran atau link and match yang jelas antara lulusan dan kebutuhan

industri.

Masalah lain yang turut menghambat efektivitas kebijakan adalah lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi program, serta belum adanya basis data nasional yang terintegrasi untuk mendeteksi kesenjangan keterampilan secara real time. Tanpa data yang akurat dan terbaru, kebijakan sering kali tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik sektor industri tertentu. Oleh karena itu, ke depan, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, asosiasi industri, dan sektor swasta dalam satu ekosistem ketenagakerjaan nasional.

Dengan penguatan sinergi antar sektor dan keberlanjutan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal dan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan angka pengangguran terdidik dan memaksimalkan potensi bonus demografi. Transformasi ini tidak hanya menuntut kebijakan yang inovatif, tetapi juga komitmen politik dan koordinasi lintas sektor yang kuat dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

3.3 Hubungan antara bonus demografi dan pengangguran terdidik dalam hal ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja:

Di tengah perkembangan demografi saat ini, Indonesia memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. (Maryati, 2015) berpendapat bahwa fenomena ini seharusnya menjadi momentum strategis untuk mempercepat kemajuan ekonomi nasional. Bonus demografi, yang diproyeksikan akan berlangsung di Indonesia hingga tahun 2030-an, memberikan jendela peluang demografis yang signifikan untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut perspektif pembangunan ekonomi, bonus demografi dapat meningkatkan tabungan nasional, akumulasi modal manusia, investasi produktif, diversifikasi ekonomi, dan industrialisasi. Namun, realisasi potensi ekonomi tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja produktif.

Terlepas dari bonus demografinya, angka pengangguran terdidik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pengangguran terdidik didefinisikan sebagai keadaan di mana orang yang telah menyelesaikan sekolah menengah dan tinggi tidak dapat masuk ke pasar kerja. Menurut (Putri & Suhartini, 2024), di era bonus demografi, usia muda (15-29 tahun) didominasi pengangguran terdidik. Beberapa ciri pengangguran terdidik termasuk kecenderungan untuk menunggu pekerjaan formal dengan jaminan sosial dan status tertentu, tingkat pengangguran tertinggi pada kelompok dengan pendidikan menengah dan tinggi, durasi mencari kerja yang lebih lama dibandingkan dengan pencari kerja dengan pendidikan rendah, dan konsentrasi geografis di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya disproporsi struktural di pasar tenaga kerja Indonesia, di mana peningkatan pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan peluang kerja.

Ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan persyaratan pasar kerja adalah penyebab utama masalah pengangguran terdidik di era bonus demografi. Studi (Nurteta, 2021) di Provinsi Jambi menemukan bahwa ada perbedaan besar antara keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan kompetensi lulusan sekolah formal. Penguasaan teoritis jauh lebih penting daripada keterampilan praktis dan kemampuan spesifik industri dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum sekolah biasanya stagnan dan tidak bergerak mengikuti perubahan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Ini berarti lulusan memiliki pengetahuan akademik yang cukup tetapi tidak memiliki keterampilan teknis dan soft skills yang diperlukan di tempat kerja. Selain itu, ada perbedaan dalam minat akademik: sebagian besar siswa dan mahasiswa menumpuk di bidang sosial humaniora, sementara kebutuhan industri meningkat di bidang teknik, sains, dan teknologi informasi. Akibatnya, ada oversupply lulusan di beberapa sektor dan kelangkaan di beberapa lainnya.

Ketimpangan dalam kompetensi lulusan disebabkan oleh disparitas kualitas di antara institusi pendidikan. Institusi pendidikan di daerah tertinggal biasanya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya pendidikan, tenaga pengajar yang berkualitas tinggi, dan akses ke informasi tentang pasar kerja terbaru. Studi yang dilakukan oleh (Khaliza et al., 2021) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun ada program pelatihan ketenagakerjaan seperti magang dan pelatihan di tempat kerja, program tersebut belum terintegrasi secara sistematis dengan kurikulum sekolah formal. Karena

kurangnya kemitraan strategis antara institusi pendidikan dan dunia usaha dan industri (DUDI), kurikulum dan pengembangan kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja memiliki banyak konsekuensi, termasuk pengangguran struktural, penurunan keterampilan lulusan, penurunan kualitas keterampilan, pembuangan otak, dan penundaan transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi.

Untuk mengoptimalkan bonus demografi, strategi komprehensif diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pasar tenaga kerja dan sistem pendidikan. Reposisi kurikulum sekolah menengah dan tinggi harus mengutamakan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan keterampilan relevan industri. Kemampuan adaptif, kewirausahaan, literasi digital, dan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) harus menjadi fokus utama dalam kurikulum. Selain itu, sangat penting untuk merevitalisasi pendidikan vokasi melalui peningkatan infrastruktur pembelajaran, peningkatan kapasitas instruktur, dan penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sesuai dengan arah transformasi ekonomi nasional, pengembangan lembaga pendidikan vokasi harus memprioritaskan sektor-sektor strategis.

Sangat penting bahwa institusi pendidikan, sektor industri, dan pemerintah bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum, penelitian aplikatif, magang terstruktur, dan sertifikasi kompetensi. Model kemitraan triple helix ini mendorong sinkronisasi terus-menerus antara output pendidikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan platform informasi pasar kerja yang lengkap dan real-time yang memungkinkan penyebaran informasi tentang tren ketenagakerjaan, kebutuhan keterampilan, dan proyeksi permintaan tenaga kerja. Sistem ini membantu sekolah dan individu dalam merencanakan jalur karier. Sangat penting untuk membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan peningkatan dan perubahan keterampilan sesuai dengan perubahan pasar kerja. Untuk mencegah disrupsi teknologi dan otomatisasi, program pelatihan khusus untuk angkatan kerja yang sudah ada harus diprioritaskan.

Ditunjukkan oleh hubungan antara bonus demografi dan pengangguran terdidik, kompleksitas tantangan struktural dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia terungkap. Paradoks terjadi karena ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja. Tingkat pendidikan dan jumlah orang yang lebih produktif tidak berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Optimalisasi bonus demografi membutuhkan pendekatan integratif yang mengintegrasikan kebijakan demografis, sistem pendidikan, dan rencana karir. Untuk mengubah potensi demografi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata, diperlukan reformasi struktural sistem pendidikan yang berfokus pada kebutuhan pasar kerja. Jika tidak ada intervensi strategis untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, Indonesia mungkin menghadapi 'beban demografis'. Ini berarti bahwa penduduk usia produktif akan menjadi beban ekonomi karena pasar kerja tidak dapat menerima tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat dari jendela peluang demografis yang sedang berlangsung, sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan di pasar tenaga kerja.

3.4 Strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus menurunkan pengangguran terdidik di Indonesia

Pemerintah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan hasil dari bonus demografi dengan mengembangkan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia serta membangun iklim ekonomi yang mendukung. Ada beberapa pendekatan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan keuntungan dari bonus demografi sekaligus mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia, antara lain:

a. Investasi dalam Pendidikan Berkualitas

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2023), kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan sejak dini melalui pendekatan siklus hidup, guna menciptakan individu yang kompeten dan mampu bersaing.

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus menurunkan pengangguran terdidik adalah melalui investasi dalam pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan memainkan peran krusial dalam menyiapkan tenaga kerja menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Langkah pertama dalam usaha ini adalah menjamin akses yang setara terhadap pendidikan yang

baik, dari tingkat dasar hingga universitas. Ini mencakup penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, pengajar yang berkualitas, dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk membekali generasi mendatang dengan keterampilan yang relevan (Satyahadewi et al., 2023).

Pemerintah harus menggabungkan kemampuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, seperti kemampuan digital, analisis data, dan teknologi, ke dalam program pendidikan. Di samping itu, peningkatan pendidikan kejuruan yang fokus pada keterampilan praktis sangat penting untuk mempersiapkan lulusan agar dapat memasuki dunia kerja. Pendidikan vokasi, baik di tingkat menengah melalui SMK maupun di pendidikan tinggi melalui politeknik, dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan, diharapkan terjadi peningkatan penyerapan lulusan oleh dunia industri.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, khususnya di lokasi-lokasi terpencil, dengan cara mendirikan sekolah, menyediakan tenaga pengajar berkualitas, serta mengembangkan teknologi pendidikan. Tindakan-tindakan ini akan membantu dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi elemen pendidikan dan keahlian, sehingga memperkuat kompetisi sumber daya manusia Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.

b. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2023) dalam buku *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020–2050*, keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyerap tenaga kerja secara optimal. Penyerapan tenaga kerja yang efektif tidak hanya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga memungkinkan individu untuk mulai mengakumulasi aset sebagai bentuk investasi masa depan.

Penduduk usia produktif memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja yang baik. Meningkatkan investasi dalam industri padat karya, yang terkenal mampu menyerap banyak tenaga kerja, adalah salah satu strategi yang dapat digunakan. Selain itu, pemerintah harus memperkuat inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja, yang mencakup meningkatkan infrastruktur untuk usaha kecil dan menengah dan meningkatkan peluang kewirausahaan.

Selain itu, diperlukan peningkatan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses pembiayaan, perluasan pasar, dan perlindungan usaha. Langkah-langkah ini akan membantu UMKM berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, menciptakan lingkungan kerja yang aman sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional. Memperluas akses terhadap pelatihan dan pengembangan kurikulum yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis (*hard skills*) dan non-teknis (*soft skills*) harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

c. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Kementerian PPN/Bappenas (2023) menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan bonus demografi tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah individu yang dapat bekerja dan perpanjangan masa bonus demografi, melainkan juga meliputi peningkatan produktivitas masyarakat. Produktivitas individu bisa dinilai berdasarkan jumlah pendapatan yang mereka peroleh dari berbagai sumber seperti upah, keuntungan bisnis, dan hasil dari investasi. Dengan mendorong produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat sebagai bagian dari bonus demografi.

d. Meningkatkan Partisipasi Kerja Perempuan

Dalam buku *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020–2050*, tertulis bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2020. Terdapat perbedaan mencolok antara tingkat partisipasi angkatan kerja pria dan wanita. Partisipasi tenaga kerja perempuan menunjukkan adanya peningkatan, meski tidak signifikan. Agar mendorong partisipasi wanita dalam dunia kerja, diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk sektor pendidikan dengan mengintegrasikan pembelajaran mengenai kesetaraan gender dalam kurikulum resmi. Dalam hal pekerjaan, banyak perempuan berpartisipasi di sektor informal. Akan tetapi, sektor informal adalah bidang yang rawan terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan hak-haknya, sehingga perempuan lebih sering bekerja tanpa kesempatan untuk berkarir. Agar partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat, diperlukan peraturan yang menekankan pada

perbaikan kesejahteraan serta penguatan kebijakan perlindungan hak-hak perempuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transisi demografi, yang tercermin dari perubahan struktur umur penduduk terutama meningkatnya proporsi usia produktif, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bonus demografi yang tengah berlangsung memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan ekonomi, asalkan dikelola secara optimal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, dan pengembangan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Meski demikian, potensi tersebut tidak akan secara otomatis berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan kebijakan yang tepat dalam bidang kependudukan, ketenagakerjaan, dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peran strategis pemerintah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memaksimalkan kontribusi penduduk usia produktif guna mendorong peningkatan produktivitas nasional serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Afryapollo, M. (2024). Mengoptimalkan Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan bagi Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, 13(2), 45–60.
- Anjarwati, L., & Juliprijanto, W. (2021). Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10, 178–187.
- Fitri, A., & Astuti, D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 1–15.
- Islamia, N. A. (2017). *Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas*. Universitas Islam Indonesia.
- Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia. *Populasi*, 26(1), 1–19.
- Junaidi, & Hardiani. (2009). *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*. Hamada Prima.
- Karmeli, E., Suprianto, & Rohana, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 124–136.
- Khaliza, S. U., Yulianti, D., & Karmilasari, V. (2021). Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 281–295.
- Maryati, S. (2015). DINAMIKA PENGANGGURAN TERDIDIK: TANTANGAN MENUJU BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education.*, 3(2), 124–136.
- Melo, R. H., Lasulika, C., & Saleh, S. E. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 123–135.
- Nainggolan, F. A., & Budiman, M. A. (2024). ANALISIS POTENSI DAN RESIKO BONUS DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 6(2), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jpei.v6i2.75220>
- Nurteta, S. (2021). 1086 | Khazanah Intelektual Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 FAKTOR DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1086–1107.
- Purba, S. S., Wasir, R., & Rahmadanti, M. D. (2024). Literature Review: Bonus Demografi Dan Sistem Kesehatan: Bagaimana Mengoptimalkan Peluang Dan Tantangan. *Juli: Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 2(3), 101–115.
- Putri, F. R. G., & Suhartini, A. M. (2024). Pengaruh Pengaruh Bonus Demografi Dan Industrialisasi Terhadap Pengangguran Terdidik Usia Muda Di Indonesia Tahun 2018-2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 269–278. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2152>
- Putri, H. Y., & Siregar, D. (2022). Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dan Bonus Demografi: Tinjauan Strategis. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 11(2), 443–461.
- Roespita, D., & Ismiyati, D. (2023). Mismatch dan Overeducation di Pasar Kerja Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 60–75.
- Rofiq, A., Saputra, A. D., & Mulyadi, D. (2020). Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Dunia Kerja di Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(1), 92–100.
- Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). PROYEKSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI 2040. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 715–725.
- Setiawan, S. A. (2018). Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 24(1), 75–60.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandi, Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). DINAMIKA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(1), 85–94. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v13i1.33>
- Tukiran, Kutanegara, P., Pitoyo, A. J., & Latief, S. (2007). *Sumber daya manusia: Tantangan masa depan*. Pustaka Pelajar.
- Utami, I., Widyastuti, D., & Hakim, A. (2021). Pengaruh Pendidikan Vokasi terhadap Kesesuaian Pekerjaan-Pendidikan di Indonesia. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 2(2), 62–70.
- Wardhani, A. M., & Nugroho, S. (2020). Efektivitas BLK Komunitas dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Muda. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Dan Ketenagakerjaan*, 5(3), 432–440.
- Yuliati, R., & Handayani, I. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 139–150.